

## NILAI – NILAI KEBIJAKAN EKONOMI DALAM AGAMA ISLAM

**Rezky Nur Annisa  
Siti Zahra**

*Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia*

Email : [annisabjm0204@gmail.com](mailto:annisabjm0204@gmail.com)

[zahrayaya2811@gmail.com](mailto:zahrayaya2811@gmail.com)

### **Abstrak**

*Paket Kebijakan dalam suatu perekonomian islami haruslah mencakup kebijakan – kebijakan yang lebih manusiawi untuk menghasilkan keadilan sosial, baik secara statis maupun dinamis. Dalam suatu masyarakat islami, proses ekonomi yang tidak sepenuhnya materialistik ini harus bersifat secara esensial non eksplotatif, yang sama sekali tidak membuka ruang gerak bagi para reaksioner yang menjegal semua reformasi sosial, karena khawatir reformasi sosial akan dibidikkan ke arah mereka.*

**Kata Kunci :** Nilai Dasar, Membangun Islam Ekonomi

### **1. Pendahuluan**

Kebijakan ekonomi (Economics policy) mengandung arti penggunaan alat – alat (Variabel Instrumental) untuk mempengaruhi atau untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Misalkan dalam suatu perusahaan dagang, dapat menggunakan variabel instrumental, seperti iklan untuk memperbesar volume penjualannya supaya pada akhirnya mencapai laba maksimal. Kebijakan Ekonomi jauh sebelumnya sudah pernah di praktekkan pada masa Rasulullah SAW dan sahabat – sahabatnya. Hal tersebut terjadi pada waktu Rasulullah diangkat sebagai kepala negara di Madinah, beliau melakukan perubahan drastis dalam menata kehidupan masyarakat di Madinah. Hal pertama yang beliau lakukan adalah membangun sebuah kehidupan sosial, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, institusi maupun pemerintahan yang bersih dari berbagai tradisi dan prinsip – prinsip Islam.

Seluruh kehidupan masyarakat disusun berdasarkan pada prinsip persamaan, kebebasan, keadilan, kebajikan. Dasar ilmu ekonomi telah diletakkan landasannya oleh Adam Smith sejak tahun 1776, kemudian berkembang menjadi konsep hukum pasar terkenal dengan teorinya “ *Bukan karena kemurahan hati tukang daging, tukang pembuat bir atau tukang pembuat roti dapat makan, akan tetapi karena mereka memperhatikan kepentingan mereka sendiri. Kita berbicara bukan karena rasa kemanusiaan, melainkan karena cinta mereka kepada mereka sendiri dan janganlah sekali – kali berbicara tentang keperluan – keperluan kita, melainkan tentang keuntungan – keuntungan mereka*”. Ilmu ekonomi. Kapitalis dan ilmu ekonomi sosialis, memisahkan diri dari filsafat etika dan kepentingan dari nilai – nilai moral. Azas ekonomi kapitalis didasarkan pada laissez faire (bebas, liberal), sedangkan azas ekonomi sosialis didasarkan pada konsep pertentangan kelas. Arus kehidupan yang terbentuk akibat dari sistem ekonomi di atas, telah mengikis nilai – nilai gotong royong, musyawarah, tolong – menolong dan kebersamaan dalam bingkai religius, sehingga mengakibatkan lahirnya kemiskinan di tengah kemakmuran yang kondisi ini dapat bertentangan dengan nilai – nilai moral dan agama, bahkan sangat menyimpang dari garis panduan islam. (*Mustafa Edwin Nasution hal. 154*)

## 2. Kerangka Teori

Konsep ekonomi islam mengacu pada prinsip syariah yang menjadi pedoman masyarakat muslim, sehingga setiap aktifitas manusia termasuk di dalamnya ada kebijakan ekonomi dan pembangunan, serta aktifitas ekonomi masyarakat sudah semestinya merujuk kepada hukum islam. Islam merumuskan suatu sistem ekonomi yang berbeda dari sistem – sistem lainnya. Hal ini karena ekonomi islam memiliki akar dari syariah yang menjadi sumber dan panduan bagi setiap muslim melaksanakan aktivitas nya. Sistem Ekonomi menurut pandangan islam mencakup pembahasan tentang tata cara perolehan harta kekayaan dan pemanfaatannya baik untuk kegiatan konsumsi maupun distribusi. Agama berfungsi untuk mengingatkan akan kesamaannya, sebagai landasan persahabatan, persaudaraan, dan tolong menolong dalam mewujudkan keadilan sosial. Sebaliknya ketidakadilan akan melemahkan solidaritas dan meningkatkan konflik dan ketegangan, serta memperburuk permasalahan manusia.

Selain keadilan, yang perlu di terapkan dalam globalisasi ekonomi adalah pendekatan multidisiplin. Hal ini karen kehidupan manusia tidak hanya terdiri dari satu komponen

yang terpisah dengan lainnya, melainkan seluruh aspek kehidupan manusia, moral, intelektual, sosial, sejarah, demografis, dan politik tersambung erat satu sama lainnya. Sistem Ekonomi Islam ini semestinya dapat berperan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi suatu negara, khususnya Indonesia. Istilah Ekonomi Konvensional mulai mencuat ketika ekonomi islam mulai – mulai berkembang. Pengembangan ekonomi islam dan penerapannya pada tata perekonomian di Indonesia diharapkan dapat membawa kesejahteraan bagi masyarakat secara keseluruhan.

### **3. Metode Penelitian**

Ekonomi Islam adalah cara sistematis yang digunakan dalam peneliti dalam pengumpulan data yang diperlukan dalam proses identifikasi dan penjelasan mengenai penelitian yang ditujukan untuk permasalahan ekonomi dalam perspektif islam, misalnya permasalahan lainnya yang berhubungan dengan aktivitas masyarakat dalam ekonomi baik ekonomi mikro dan makro. Dalam peneliti ekonomi islam yakni hukum – hukum ekonomi islam yang praktis atau berupa perilaku ekonomi di kalangan umat islam, dapat diterapkan metode deskriptif dengan pendekatan normatif. Penelitian ini dapat berkaitan dengan pemikiran ulama tentang ekonomi islam, fatwa para mazhab tertentu. Bahkan metode deskriptif dapat digunakan dalam penelitian yang menggunakan berbagai pendekatan perbandingan.

### **4. Hasil dan Pembahasan**

Kebijakan dalam suatu perekonomian islami mencakup kebijakan – kebijakan yang lebih manusiawi untuk menghasilkan keadilan sosial, baik secara statis maupun dinamis. Sementara perananan inisiatif perorangan haruslah diberi pertimbangan yang cukup. Suatu perekonomian islami pada umumnya akan dikuasai oleh pengarah dan pengendalian pemerintah atau kegiatan ekonomi yang berazaskan islam. Kebijakan Enomomi sebelumnya sudah pernah

di praktek an oleh Rasulullah SAW dan sahabat sahabat tersebut, pada tahun – tahun awal sejak dideklarasikannya sebagai sebuah negara, Madinah hampir tidak memiliki sumber pemasukan atau pengeluaran negara. Seluruh tugas negara dilaksanakan kaum muslimin secara gotong royong dan sukarela. (Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam, Jakarta :PT, Raja grafindo persada, 1994,cet -2 h.36)

Kebijakan dalam suatu negara islam harus sepenuhnya sesuai dengan prinsip hukum dan nilai – nilai islam. Hukum agama islam adalah untuk mencapai kemaslahatan tersebut hanya akan dapat dicapai apabila seluruh sistem hukum dalam ekonomi islam berjalan sesuai dengan ideologi islam, berdasarkan Al Qur'an – As Sunnah Rasulullah SAW.

Nilai – nilai penting dalam ajaran islam yang dapat diterima oleh masyarakat adalah nilai kearifan, nilai kejujuran, nilai ketakwaan, nilai kesucian, dan nilai moral. Sarana – sarana kebijakan ekonomi adalah alat – alat yang digunakan untuk mencapai tujuan ekonomi. Sarana – sarana yang digunakan para pengelola ekonomi dalam perekonomian islam sangat bervariasi, mulai dari dorongan moral dan diakhiri dengan pelaksanaan mekanisme secara langsung. Menurut Monzer Khaf, alat- alat utama yang ada di tangan para pejabat ekonomi adalah

- Alat – alat moneter, dalam hal ini mencakup pengelolaan nilai tukar dan pengelolaan tanpa bunga, serta prosentase moneterisasi zakat, baik untuk kepentingan pengumpulan maupun pendistribusiannya.
- Alat – alat fisikal, mencakup dalamnya kebijakan perpajakan dan defisit anggaran. Prinsip islam tentang alat – alat fisikal dan anggaran belanja ini bertujuan untuk mengembangkan suatu masyarakat yang di dasarkan atas distribusi kekayaan.
- Alat – alat produksi, prinsip fundamental yang harus selalu diperhatikan dalam proses produksi adalah prinsip kesejahteraan ekonomi. Kesejahteraan ekonomi menurut konsep islam adalah terletak pada kenyataan, bahwa hal ini tidak mengabaikan kesejahteraan umum. Dengan demikian alat – alat produksi dalam suatu perekonomian islam harus dikendalikan dengan kriteria obyektif maupun subyektif. Kriteria obyektif diukur dengan kesejahteraan material, sedangkan kriteria subyektif harus tercermin dalam kesejahteraan yang dinilai dari segi etika ekonomi islam.
- Alat – alat distribusi hal ini berkaitan dengan pengalokasian harta dan penghasilan di antara individu – individu .

## 5. Simpulan

Dunia yang berkembang terus dengan jumlah penduduk yang semakin banyak menimbulkan berbagai macam permasalahan dalam kehidupan manusia sehari – hari. Termasuk dalam hal ini masalah bagaimana cara manusia untuk dapat mencukupi berbagai

kebutuhan hidup sehari – hari. Masalah ini dapat dikategorikan sebagai masalah – masalah perekonomian.

Perkembangan ekonomi sangatlah terkait dengan kebijakan suatu pemerintahan, maka dalam praktek nya pada setiap masa pemerintahan sistem ekonomi ini memiliki wajah yang beragam. Adanya keragaman ini, kiranya dapat menjadi pelajaran berharga bagi setiap orde pemerintahan dalam perumusan suatu kebijakan yang sedapat mungkin bisa merujuk cita – cita mulia dari sistem ekonomi itu sendiri.

Dalam islam dikenal dua macam kebijakan ekonomi yaitu, kebijakan ekonomi fisik dan ekonomi moneter. Dalam sejarah kebijakan ekonomi islam banyak cendekiawan yang menyumbangkan pemikiran mengenai cara – cara mengatasi permasalahan ekonomi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Rianto, M. N. (2010). *TEORI MAKROEKONOMI ISLAM*. Bandung : Alfabeta Bandung.
- Chapra, Umer. *Sistem Moneter Islam*, terjemahan dari Toward Just Monetary System, diterjemahkan Abidin basri, Gema Insani Press, Jakarta,2000.
- Chapra, Umer. *The future of Economics : An Islamic Perspective* ,. SEBI Institute, Jakarta ; 2001.
- Setyanto, Budi, *Ekonomi Islam* : Perdana Media Group, Jakarta ; 2010.
- Rivai, Veithzal. *Islam economics Ekonomi Syariah* . Jakarta :2009 H. 20
- Setyanto, Budi. *Ekonomi Islam: Perdana Media Group*, Jakarta ; 2010.
- Mannan, M. Abdul. *Teori Ekonomi Islam*. PT Dana Bakti Wakaf, Yogyakarta ; 1997
- Imam Suprayogo dan Tobroni , 2001. *Metedologi Penelitian Agama*, Bandung : Rosda Karya.